

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2014
TANGGAL 20 MARET 2015**

*Bismilahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

- ☞ Yang Terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
- ☞ Yang Terhormat Rekan-rekan Forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Ternate.
- ☞ Yang Terhormat Wakil Walikota Ternate.
- ☞ Yang Terhormat Para Pimpinan Perguruan Tinggi.
- ☞ Yang Terhormat Para Asisten, Staf Ahli, Para Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Ternate.
- ☞ Yang Terhormat Saudara Camat dan Lurah se Kota Ternate, rekan-rekan pers dan media massa.
- ☞ Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya, petunjuk dan bimbingan-Nya yang tak putus-putus diberikan kepada kita sekalian, karena atas hanya kehendak-Nya kita semua dapat berada di tengah-tengah mimbar rakyat ini untuk saling bersilaturahmi dan bertemu kembali dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate yang terhormat, guna menghadiri Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2014.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua,
Sidang Dewan Yang Terhormat.*

Tujuan utama dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung-jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban yang salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 (ayat 1), mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut juga dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Pelaksanaan LKPJ juga dilakukan sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana di tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kota Ternate memiliki kewajiban dalam penyelenggaran pemerintahan daerahnya untuk menyampaikan LKPJ Walikota Ternate Tahun 2014 kepada DPRD Kota Ternate. Dengan demikian, LKPJ ini disusun berdasarkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 11 Tahun 2013 tentang RKPD Kota Ternate Tahun 2014 yang merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Ternate

Tahun 2011-2015, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 39 Tahun 2012 tentang RPJP Kota Ternate Tahun 2005-2025.

Oleh karena itu Saya mengajak kepada kita semua untuk dapat melihat secara objektif sejumlah indikator keberhasilan, baik indikator program maupun indikator makro pembangunan di semua aspek yang Saya sampaikan dalam laporan pertanggungjawaban ini yang meliputi **Aspek Gambaran Umum Daerah, Keuangan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, dan Aspek Bencana dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

*Saudara Ketua, Wakil Ketua,
Sidang Dewan Yang Terhormat.*

Pertama-tama kami awali dengan **Aspek Gambaran Umum Daerah**, sebagaimana kita ketahui dalam Tahun Anggaran 2014 terdapat sejumlah isu dan permasalahan krusial, baik permasalahan aktual maupun permasalahan khas perkotaan, antara lain :

1. Masalah Sumber Daya Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan.
3. Masalah Penataan Kawasan Perkotaan.
4. Masalah Banjir, Sampah dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Masalah Pendidikan, Kesehatan
6. Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan.
7. Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal.
8. Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Upaya mengatasi permasalahan dan isu strategis diatas dilakukan melalui 11 Program Prioritas yang dituangkan kedalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Kota Ternate 2011-2015, dengan penguatan pada 2 (dua) program prioritas sebagai fokus utama pembangunan di Tahap IV, antara lain :

1. **Pelayanan Publik yang cepat, Murah dan Mudah;** yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas.
2. **Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir secara berkelanjutan;** yang diarahkan pada peningkatan kemandirian masyarakat, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktifitas, dan kemampuan daya saing.

Disamping melaksanakan penguatan pada 2 program prioritas tahun 2014 Pentahapan RPJM Kota Ternate 2011-2015, juga telah terimplementasi sejumlah program/kegiatan SKPD untuk 9 Program Prioritas lainnya yang bersifat strategis dan populis, yang secara bersinergi telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi makro Kota Ternate di tahun 2014, dengan gambaran capaian kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Ternate melalui APBD tahun anggaran 2014, Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu, maka indikator ini digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Ternate. Pertumbuhan ekonomi Kota Ternate pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 7,60 %, tercatat meningkat jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang sebesar 7,56%. Struktur ekonomi secara kuantitatif digambarkan dengan menghitung persentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara keseluruhan pencapaian kinerja PDRB tahun 2014 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan cukup tinggi dari tahun 2013 yaitu Rp. 1.504,8 Milyar pada tahun 2013 menjadi

Rp. 1.707,3 Milyar pada tahun 2014. Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Kota Ternate.

Nilai pertumbuhan ekonomi dan PDRB di atas, sebagian besar disumbang oleh sektor-sektor ekonomi yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi total nilai PDRB Kota Ternate, khususnya di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Jasa dengan tidak mengesampingkan peran sektor lain seperti Pertanian, Industri Pengolahan yang telah berperan dengan optimal yang bersinergi dengan implementasi sejumlah program/kegiatan pendukung SKPD, sehingga mampu menciptakan nilai tambah pada barang dan jasa di sektor-sektor tersebut.

Pada tahun 2014, pendapatan perkapita masyarakat Kota Ternate mencapai Rp. 7.623.797,- mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar Rp. 6.844.287,-. Hal ini menunjukkan produktivitas yang tinggi pada sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Walaupun mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif besar, dengan data jumlah penduduk pada tahun 2014 sebesar 207.789 jiwa, namun pendapatan perkapita mampu tumbuh sebagai refleksi tingkat pendapatan penduduk di Kota Ternate.

PDRB dan pendapatan perkapita yang mengalami kenaikan dan pertumbuhan ekonomi yang terus berada pada posisi positif pada tahun 2014, secara langsung telah berdampak pada perbaikan kemampuan atau daya beli masyarakat yang berpengaruh terhadap permintaan kebutuhan akan barang dan jasa. Pemenuhan yang tidak berimbang dengan permintaan selama ini sangat berdampak pada terjadinya inflasi di Kota Ternate.

Besarnya inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga

konstan) setiap tahun dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi menggambarkan besarnya perubahan harga barang dan jasa yang beredar di pasaran. Pergerakan inflasi tahunan (*year on year*) Kota Ternate mengalami peningkatan pada tahun 2014 yang tercatat sebesar 9,34 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar 9,78 persen.

Secara kumulatif tahun 2014 kelompok bahan makanan memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,95 persen, kelompok makanan jadi, minuman dan rokok memberikan sumbangan inflasi sebesar 1,46 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberikan andil sebesar 2,50 persen, kelompok sandang 0,80 persen, kelompok kesehatan 0,56 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,31 persen serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan memberikan andil sebesar 2,76 persen.

Ketersediaan sarana dan prasarana di bidang perdagangan dan jasa serta dengan dukungan kemudahan birokrasi dalam perizinan, hal ini telah diimplementasi dengan pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2014 dan diharapkan mampu secara langsung dapat menumbuhkan semangat berinvestasi menuju pada pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Ternate sebagai Kota Mandiri.

Adanya investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta terutama melalui pembangunan infrastruktur jasa dan perdagangan secara sinergis juga telah mampu mendorong berbagai perkembangan usaha di Kota Ternate. Begitu pula kebijakan pembangunan fasilitas perbankan dengan permodalan usaha serta pengembangan dan perluasan investasi swasta, telah mampu menjaga angka trend pertumbuhan ekonomi dan juga telah mampu menyerap tenaga kerja yang bertambah setiap tahunnya di Kota Ternate, hal ini disebabkan sudah semakin membaiknya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa serta dukungan iklim usaha yang sudah semakin kondusif serta kemudahan dalam pelayanan birokrasi.

Kota Ternate sekarang telah menjadi pusat pertumbuhan investasi, hal ini dapat dilihat dari masuknya investor-investor nasional di bidang retail dan pusat hiburan, cabang perusahaan penerbangan maupun BUMN dan pembukaan cabang Bank Nasional di Kota Ternate.

Kemajuan perekonomian suatu daerah ditandai pula dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan. Permasalahan penting dalam bidang ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran yang selama ini dihadapi. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Peningkatan tingkat pengangguran terbuka secara signifikan dialami Ternate, TPT di Kota Ternate tahun 2013 yang tercatat sebesar 4,73 persen (hasil Sakernas Agustus 2013) meningkat menjadi 8,72 persen pada Agustus 2014. Peningkatan angka pengangguran yang cukup signifikan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yang pertama perubahan pada jumlah angkatan kerja mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2014 sebesar 78,92 persen. Naiknya TPAK tersebut ditengarai disebabkan meningkatnya penduduk usia 15 tahun ke atas, terutama lulusan SLTA yang tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi sebesar 13,25 persen tidak terserap ke pasar tenaga kerja. Faktor yang kedua, peningkatan angka pengangguran tersebut karena berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pada tanggal 12 Januari 2014 tentang mineral dan batubara berupa pelarangan ekspor mineral mentah sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran oleh perusahaan tambang di Maluku Utara. Sebagai pusat perekonomian di

Maluku Utara maka Ternate menjadi tujuan utama para mantan karyawan tersebut untuk mencari pekerjaan baru. Walaupun demikian secara umum orang yang bekerja pada tahun 2014 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013, dimana orang yang bekerja pada tahun 2013 sebesar 77.271 orang sedangkan pada tahun 2014 sebesar 85.232 orang. Di samping itu bila kita melihat daya serap tenaga kerja pada beberapa sektor strategis, pada tahun 2014 cukup meningkat pada tahun 2013 antara lain sektor industri tahun 2014 sebesar 12.519 orang dibandingkan tahun 2013 yang hanya 6.705 orang, begitu pula sektor jasa pada tahun 2014 meningkat 66.924 orang dibandingkan tahun 2013 sebesar 62.886 orang. Adanya peningkatan orang bekerja dan daya serap kerja pada beberapa sektor strategis, mengindikasikan pembangunan beberapa infrastruktur jasa dan perdagangan serta kebijakan investasi dua tahun terakhir, memberikan efek yang positif bagi penyerapan tenaga kerja.

Di samping itu kinerja keberhasilan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat antara lain dapat dilihat dari angka kemiskinan Kota Ternate pada tahun 2013 menurun 3,24 persen dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 4,00 persen, tahun 2014 walaupun belum dirilis oleh BPS Kota Ternate tetapi dengan indikasi pertumbuhan ekonomi dan investasi saat ini diharapkan akan terus menurun. Begitu pula bila dikaitkan dengan parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan tiga indeks yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pendapatan. Nilai IPM Kota Ternate tahun 2013 sebesar 78,44 persen, merupakan yang tertinggi dari kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Dari hasil penghitungan IPM ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan selama ini khususnya di Bidang Pendidikan dan Kesehatan telah berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti yang tergambar pada angka Indeks Pembangunan Manusia tersebut. Selain itu terjadi kenaikan pada indeks pendapatan masyarakat, sebagaimana

digambarkan oleh struktur PDRB, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun pendapatan perkapita yang menunjukkan adanya kenaikan daya beli masyarakat, hal ini sejalan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua,
Sidang Dewan Yang Terhormat.*

Selanjutnya pada **Aspek Keuangan**, dalam Tahun 2014 Pemerintah Kota terus melakukan penguatan struktur APBD dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah, baik melalui regulasi peraturan daerah maupun dengan memanfaatkan peningkatan sektor jasa dan iklim investasi yang semakin kondusif, dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian daerah. Selama tahun 2014 gambaran target dan realisasi pendapatan dan belanja sebagai berikut :

Target Dan Realisasi Pendapatan

Adapun target pendapatan daerah Kota Ternate tahun 2014 sebesar Rp. 754.743.993.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 777.685.702.473,- atau 103,04 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Adapun target Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate pada tahun 2014 sebesar Rp. 54.493.884.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 57.488.803.335,- atau 105,50 persen.

2. Dana Perimbangan

Adapun target Dana Perimbangan pada tahun 2014 sebesar Rp. 630.640.109.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 641.592.436.975,- atau 101,74 persen.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah

Adapun target Lain-lain Pendapatan Daerah pada tahun 2014 sebesar Rp. 69.610.000.000,- dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp. 73.604.462.163,- atau 105,74 persen.

Target dan Realisasi Belanja

Adapun anggaran belanja dalam APBD Kota Ternate tahun 2014 sebesar Rp. 784.914.846.000,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 730.661.749.730,- atau 93,09 persen dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Adapun Belanja Tidak langsung dalam APBD tahun 2014 sebesar Rp. 421.277.318.551,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 392.232.921.336,- atau 93,11 persen dari total anggaran, dengan rincian komponen belanja tidak langsung sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dalam tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 400.388.318.551,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 371.948.003.366,- atau 92,90 persen dari total anggaran.
- b. Belanja Hibah dalam tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 5.350.000.000,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 5.300.000.000,- atau 99,07 persendari total anggaran.
- c. Belanja Bantuan sosial dalam tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 5.000.500.000,- dengan realisasi hingga akhir tahun sebesar Rp. 4.799.967.700,- atau sebesar 95,99 persen dari total anggaran.
- d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 538.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 498.370.270,- atau sebesar 92,55 persen.
- e. Belanja Tidak terduga pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.686.580.000,- atau sebesar 96,87 persen.

2. Belanja Langsung

Adapun belanja Langsung dalam APBD tahun 2014 sebesar Rp. 363.637.527.449,- realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar

Rp. 338.428.828.394,- atau 93,07 persen dari total anggaran, dengan rincian komponen belanja langsung sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dalam tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 58.747.000.200,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 55.442.192.082,- atau 94,37 persen dari total anggaran.
- b. Belanja Barang dan Jasa dalam tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 142.678.968.710,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 133.797.205.425,- atau 93,78 persen dari total anggaran.
- c. Belanja Modal dalam tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 162.211.558.539,- dengan realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp. 149.189.430.887,- atau 91,97 persen dari total anggaran.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua,
Sidang Dewan Yang Terhormat.*

Selanjutnya **Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**, pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib yang terdiri 22 Bidang Pelayanan melaksanakan dari 290 program dan 1.498 kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2014, berdasarkan fungsi pelayanan SKPD sebesar Rp. 335.446.444.449,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 311.280.558.042,24,- atau 92,80 persen.

Untuk urusan pilihan yang terdiri 6 Bidang Pelayanan melaksanakan dari 53 program dan 223 kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2014, berdasarkan fungsi pelayanan SKPD sebesar Rp. 28.191.083.000,- realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 27.148.270.352,- atau 96,30 persen.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua,
Sidang Dewan Yang Terhormat.*

Selanjutnya **Aspek Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**, untuk instansi pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Ternate dalam tahun 2014 yang berasal dari Pemerintah, sebagai berikut :

1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Satuan Tugas Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

1. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate
3. Dinas Kesehatan Kota Ternate
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate

Sumber Dan Jumlah Anggaran

1. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate
Sumber dana untuk 2 (dua) kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berasal dari APBN, dengan total anggaran sebesar Rp. 590.190.000,-, realisasi hingga akhir tahun 100 persen.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate
Sumber dana untuk 2 (Dua) kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan berasal dari APBN, dengan Jumlah anggaran sebesar dengan total anggaran sebesar Rp. 7.319.232.000,- realisasi hingga akhir tahun 100 persen.
3. Dinas Kesehatan Kota Ternate
Sumber dana untuk 3 (Tiga) kegiatan di Dinas Kesehatan berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.230.000.000,-, dan realisasi hingga akhir tahun 100 persen.

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate

Sumber dana untuk 1 (satu) kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000.- dan realisasi hingga akhir tahun 100 persen.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua,
Sidang Dewan Yang Terhormat.*

Selanjutnya pada bagian akhir penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota ini, akan dilaporkan **Aspek Bencana dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

Kejadian Bencana yang diakibatkan meletusnya Gunung Api Gamalama pada tanggal 18 Desember 2014 pukul 22.41 WIT hingga dinaikkan statusnya menjadi Siaga (Level II), menyebabkan hujan abu di wilayah Pulau Ternate dan tersebar pada 4 (empat) wilayah kecamatan, namun dampak bencana tersebut tidak menimbulkan kerusakan infrastruktur, pemukiman dan sarana umum. Meskipun hal tersebut tidak menimbulkan kerusakan, namun aktivitas masyarakat cukup terganggu dan terbatasnya akses publik Bandara Babullah yang harus ditutup selama 11 hari.

Pada tanggal 06 Desember 2014 pukul 23.45 WIT terjadi bencana Kebakaran pada Pasar Seribu Kios Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah dan terjadi selama kurang lebih 3 (tiga) jam akibat arus pendek listrik. Kejadian bencana Kebakaran Pasar Seribu Kios ini mengakibatkan 178 unit kios hangus terbakar dan dirasakan cukup berdampak karena berperan melumpuhkan perekonomian masyarakat Ternate. Meskipun bencana tersebut tidak menimbulkan korban jiwa namun menimbulkan kerugian berupa barang dagangan dan barang-barang milik pedagang yang menempati lokasi tersebut, dengan perkiraan kerugian mencapai 1,5 Milyar Rupiah.

Bencana Gempa Teknonik juga terjadi pada tanggal 15 November 2014 pukul 09.31 WIT dengan kekuatan 7,3 Skala Richter. Kejadian gempa tidak menimbulkan korban, baik korban jiwa maupun harta benda dan tidak ada kerusakan dan kerugian yang terjadi bagi masyarakat Kota Ternate khususnya serta tidak menimbulkan kepanikan dan keresahan masyarakat.

Oleh karena itu langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Ternate, antara lain pemberlakuan tanggap darurat bencana sejak 18 Desember 2014 sampai 02 Januari 2015, peringatan dini bencana erupsi Gunung Api dan Tsunami serta tetap melakukan normalisasi sungai, revitalisasi barangka dan perbaikan talud sebagai antisipasi bencana banjir lahar dingin, serta sosialisasi kepada masyarakat terhadap resiko dan bahaya kebakaran.

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Secara umum pada tahun 2014 situasi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Ternate relatif kondusif dimana beberapa masalah terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dapat diatasi. Eskalasi kejadian pertikaian masyarakat/pemuda antar kampung di Kota Ternate pada tahun 2014 dapat dikatakan relatif mengalami penurunan dari pada tahun-tahun sebelumnya dimana masih tercatat 6 kasus tawuran dan masih adanya gangguan lain yakni maraknya peredaran Narkoba, minuman keras dan judi.

*Saudara Ketua, Wakil Ketua,
Sidang Dewan Yang Terhormat.*

LKPJ Walikota Ternate Tahun 2014 disusun dengan penekanan pada aspek pengawasan dan pengendalian guna melihat dan mengevaluasi terhadap perkembangan (*progress*) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih memfokuskan pada pelaksanaan berbagai urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas telah diupayakan implementasinya secara simultan oleh Pemerintah Kota Ternate dengan mewujudkan akuntabilitas secara horisontal melalui penyampaian LKPJ kepada DPRD.

Berdasarkan gambaran kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar LKPJ Walikota akhir tahun anggaran 2014 berupaya menggambarkan manajemen pembangunan kota yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian output, hasil, manfaat dan dampak pembangunan kota dalam 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan analisis dan indikator kinerja pembangunan kota yang dipaparkan sebelumnya, dapat dipastikan ada kemajuan pembangunan kota yang dicapai selama tahun 2014, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara memadai.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, dengan keterbatasan sumberdaya pembangunan kota yang dimiliki, belum seluruh harapan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate bersama-sama dengan segenap komponen pembangunan kota harus terus bekerjasama dan sama-sama bekerja, untuk mewujudkan harapan-harapan dan kebutuhan yang lebih besar tersebut pada masa yang akan datang, sehingga tercipta masyarakat dan Kota Ternate yang Berbudaya, Agamais, Harmoni, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.

Dapat disimpulkan juga bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Ternate Tahun 2014 bersifat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (*progress report*) dan merupakan rangkaian pelaksanaan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan dari tahun tahun sebelumnya sebagaimana dalam rangkaian 5 tahunan pelaksanaan RPJMD Kota Ternate 2011-2015. LKPJ Tahun 2014 ini diharapkan dapat berperan sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja RKPD Tahun 2014 yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2011-

2015. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja tahun selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Di samping itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ini akan menjadi laporan awal tentang penyelenggaraan pemerintahan, sebelum kita masuk pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang sesuai aturan normatif akan disampaikan setelah diperiksa oleh BPK, yang mencakup laporan nota perhitungan, aliran kas dan neraca daerah, yang disampaikan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.

Demikian pokok-pokok substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2014 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, untuk selanjutnya akan menjadi referensi kajian Dewan yang terhormat.

Mengakhiri laporan ini, yang merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban terakhir dalam masa jabatan Saya 2010-2015 dan sebagai bukti prasasti serta karya nyata bersama saudara-saudara anggota dewan yang terhormat, yang merupakan wujud dari pengabdian kepada masyarakat dan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Maka Saya secara pribadi maupun atas nama Walikota bersama saudara Saya Wakil Walikota, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berlangsungnya kemitraan selama ini, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dengan tujuan dan manfaat serta dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Kota Ternate.

Terima kasih dan penghargaan pula kami sampaikan kepada para Muspida, Pimpinan instansi vertikal maupun semua pihak, yang telah menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Ternate selama ini,

demikian pula atas peran pers dan media massa maupun unsur *stakeholder* lainnya dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Ternate.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhai dan memberikan kekuatan kepada kita bersama dalam melaksanakan amanat rakyat dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan di daerah ini.

Ternate, 20 Maret 2015

WALIKOTA TERNATE

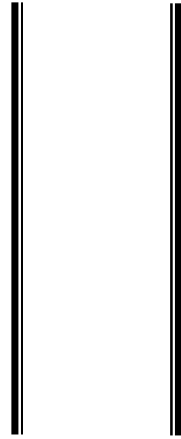
H. BURHAN ABDURAHMAN

PIDATO



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2014
DIHADAPAN SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TERNATE**

TANGGAL, 20 MARET 2015



PEMERINTAH KOTA TERNATE
TAHUN 2015